

BAB III

PERLAWANAN TAN MALAKA TERHADAP HEGEMONI

KAPITALISME DI INDONESIA

A. Pergolakan Kelas Antara Kaum Proletariat dan Kaum Borjuis

Sejarah atas semua masyarakat yang lahir hingga sekarang ini adalah sejarah perjuangan kelas. Orang merdeka dan budak, patrisian dan plebeian, tuan bangsawan dan tani hamba pendeknya penindas dan yang tertindas senantiasa semua sudah menjadi peretentangan satu dengan yang lain, melakukan perjuangan yang tiada putus-putusnya kadang juga tersembunyi kadang juga bisa terbuka sehingga perjuangan yang terjadi dengan perombakan revolusioner seluruh masyarakat atau mereka sama-sama binasanya antara kelas-kelas yang bermusuhan.

Adanya kelas yang bermusuhan timbulnya konflik besar maka akan datang perubahan sosial. Karl Marx dengan argumentasi tentang pelaku utama perubahan sosial, ia melihat penyebabnya perubahan bukan dari sudut pandang individu melainkan kelas sosial. Ia juga melihat di dalam kehidupan masyarakat yang memiliki corak membatasi kelas sehingga terdapat kelas yang berkuasa dan kelas yang dikuasai.⁷⁹

Marx berbicara tentang kelas atas dan kelas bawah karena perhatiannya terarah pada kehidupan masyarakat kontemporer, akan melihat perbedaan kehidupan itu pada kritik Marx terhadap masyarakat kapitalis. Marx bertolak dari

⁷⁹ Franz Magnis Suseno, *Pemikiran Karl Marx: Dari Sosialisme Utopis ke Perselisihan Revisionisme*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2017), hlm. 118

analisis keterasingan suatu pekerjaan karena dalam pekerjaan akan melibatkan dua kelas sosial yang berlawanan, yaitu kelas buruh dan kelas majikan. Kelas para majikan mereka memiliki alat kerja, lalu kelas buruh mereka hanya mempunyai tenaga mereka yang dipekerjakan sehingga nanti hasil kerja itu bukan lagi milik buruh melainkan milik majikannya itulah yang menyebabkan keterasingan dalam pekerjaan.⁸⁰

Terlihat terjadi ketimpangan antara kelas majikan dengan kelas buruh walaupun diketahui kelas ini juga saling membutuhkan satu sama lain. Interpretasinya adalah kelas pemilik modal atau majikan adalah kelas yang kuat dan kelas pekerja para buruh adalah kelas lemah, Sehingga dalam ciri khas masyarakat kapitalis pembagian dalam kelas atas dan kelas bawah, kelas atas adalah pemilik produksi kelas bawah adalah kaum buruh. Kelas bawah mereka harus patuh terhadap kekuasaan kelas atas apa sebenarnya keuntungan itu bagi kelas atas keuntungannya kelas atas tidak usah bekerja karena mereka bisa hidup dari pekerjaan kelas bawah karena buruh yang bekerja pada mereka.

Hubungan antara kelas atas dan kelas bawah hakikat sebenarnya adalah hubungan pengisapan atau eksploitasi. Kelas pemilik hidup dari pengisapan tenaga kerja kelas buruh. Pemilik modal, kapitalis secara hakiki adalah seorang pengisap kerja orang lain dan kebalikannya kelas buruh sebagai korban kelas yang diisap oleh kapitalis kelas atas. Hubungan keduanya jelas hubungan kekuasaan yang satu berkuasa atas yang lain, sehingga kelas atas jelas sebagai penindas hegemoninya para kapitalis. Lalu buruh sebagai pekerja upahan yang menjual

⁸⁰ *Ibid*, hlm. 119

tenaganya untuk memperoleh upah yang dipekerjakan oleh kapitalis merupakan pekerjaan kaum tertindas dan hak mereka dirampas.

Zaman sejarah yang lampau hampir semua didapati masyarakat dengan susunan lengkap berbagai macam golongan dan macam kedudukan sosial. Semua terjadi atas efek dari sistem feodal yang tidak menghapuskan sistem kelas, maka muncul masyarakat borjuis tidak adanya penghapusan sistem kelas akhirnya kelas itu membuat sistem kelas baru, syarat penindasan baru, dan membuat bentuk perjuangan-perjuangan baru sebagai pengganti yang lampau.

Ada dua kubu besar yang notabene masyarakat itu semakin terpecah dan masyarakat akan berhadapan langsung satu dengan yang lainnya, ia adalah borjuis dan proletariat. Dilihat dalam kekuasaan borjuis telah menundukkan desa terhadap kekuasaan kota borjuis yang menciptakan kota-kota hebat, ia juga memperbanyak penduduk kota dibandingkan penduduk desa, dengan demikian ia telah melepaskan kehidupan penduduk dari kehidupan desa. Sebagaimana dilihat telah menjadikan desa memiliki ketergantungan terhadap kota.

Borjuis semakin banyak menghapuskan keterpencaran alat-alat produksi kepemilikan dan penduduk. Ia telah menghimpun penduduk untuk memusatkan alat produksi dan telah mengkonsentrasikan kepemilikan dalam beberapa tangan provinsi-provinsi yang baru merdeka akan bersekutu dengan berbagai macam kepentingan. Kepentingan dari borjuis ketika menggunakan senjata-senjata untuk menumbangkan feodalisme berbalik sekarang terhadap borjuis itu sendiri tetapi, borjuis tidak hanya menempa senjata-senjata mereka melainkan akan melahirkan

manusia yang akan menggunakan senjata-senjata itu kelas buruh modern yaitu kaum proletar.

Perkembangan dari borjuis artinya akan muncul perkembangan dari kapital dan perkembangan proletariat kelas buruh yang mereka hidup ketika mereka hanya mendapat pekerjaan dan saat bekerja mereka hanya memperbesar kapital. Kaum buruh yang harus menjual dirinya secara potongan adalah komoditi seperti setiap jenis jualan lainnya, akan menderita ketika ada pengaruh terhadap perubahan persaingan dan segala hal terjadi dengan adanya kegoncangan pasar.

Industri modern telah mengubah contoh bengkel kecil kepunyaan tukang ahli menjadi pabrik besar kepunyaan kapitalis industri. Masa kaum buruh yang dikumpulkan dalam pabrik diorganisir secara militer mereka di tempatkan sebagai serdadu biasa dan dalam pengawasan hierarki, mereka tidak hanya menjadi budak kelas borjuis dan budak negara borjuis, mereka setiap hari dan setiap jam diperbudak oleh mesin-mesin, oleh mandor-mandor, terlihat mereka diperbudak oleh setiap pabrik borjuis itu sendiri. Semakin terang-terangan kelaliman ini menyatakan keuntungan sebagai tujuan terakhir.⁸¹

Proletariat menempuh berbagai tingkat perkembangan perjuangan melawan borjuis dimulai bersamaan dengan eksistensinya. Bermula kaum buruh orang-seorang satu pabrik kemudian kaum buruh dari satu cabang pekerjaan disatu tempat melawan borjuis, orang-seorang yang langsung menghisap mereka. Mereka tidak hanya mengerahkan serangan-serangan terhadap hubungan produksi borjuis melainkan terhadap perkakas produksi itu sendiri, mereka menghancurkan

⁸¹ Karl Marx – Fridrich Engels, *Manifesto Partai komunis*, (Bandung: Ultimus, 2015), hlm. 38

barang-barang asing yang bersaing mereka menghancurkan mesin-mesin, membakar pabrik dan mereka berusaha mencabut dengan merebut kembali kedudukan buruh pada zaman pertengahan.

Selanjutnya seperti yang dilihat bagian dari kelas yang berkuasa dicampakkan oleh kemajuan industri ke dalam barisan proletariat, setidaknya-tidaknya syarat hidup mereka terancam. Dari semua kelas yang berdiri saat itu saling berhadap-hadapan dengan borjuis, hanya proletariatlah yang satu-satunya kelas benar-benar revolusioner, kelas-kelas lainnya melebur dan lenyap bersamaan dengan munculnya industri besar dan memang proletariat yang sebenarnya merupakan kelas dari hasil industri besar itu.

Semua kelas terdahulu yang merebut kekuasaan berusaha memperkuat kedudukan mereka yang telah direbutnya dengan menundukkan seluruh masyarakat pada syarat-syarat yang menjamin penghasilan mereka. Sementara kaum proletar hanya merebut tenaga-tenaga produktif kemasyarakatan, jika ingin menghapuskan kepemilikan artinya menghapuskan juga kepemilikan terdahulu. Kaum proletar tidak mempunyai apa-apa yang harus dilindungi mereka harus menghancurkan semua jaminan dan perlindungan atas harta kekayaan perseorangan yang ada sampai sekarang.

Walupun tidak dalam isinya dalam bentuknya perjuangan proletariat melawan borjuasi adalah perjuangan nasional. Perkembangan proletariat dalam mengusut perang dalam negeri yang sedikit banyaknya akan tersembunyi didalam masyarakat yang ada sampai pada titik di mana perang dalam negeri itu akan meletus menjadi revolusi terbuka dan melalui penggulingan borjuis dengan

kekerasan, proletariat akan mendirikan kekuasaannya, artinya dengan tidak adanya lagi keselerasan borjuis terhadap masyarakatnya, maka eksistensi borjuis akan melebur dan hilang dalam tatanan kehidupan masyarakat.

Syarat pokok dalam kelangsungan hidup dan kekuasaan dari kelas borjuis adalah dengan penimbunan kekayaan ke dalam tangan perseorangan, pertumbuhan dan pemebentukan kapitalis. Syarat untuk kapital adalah kerja upahan dan kerja upahan itu didasarkan atas persaingan antara kaum buruh itu sendiri, kemajuan industri yang tak sadar dan tak berlawanan adalah borjuis menggantikan keadaan terpicilnya kaum buruh yang disebabkan oleh persaingan dengan persatuan revolusioner mereka.

Bersama perkembangan industri besar landasan itu sendiri tempat borjuis dalam memperoleh hasil produksi memiliki hasil-hasil barang direnggut melalui kaki borjuis. Borjuis pertama mendapatkan penggali liang kuburnya sendiri sehingga dalam situasi keruntuhan borjuis dilihat dan tak dapat kita campakkan lagi sehingga kemenangan kaum proletariat atau buruh sudah tidak dapat terelakkan lagi.⁸²

Berangkat dari negara Indonesia yang masih kuno dengan berbagai cara kaum imperialis melakukan hegemoninya dalam cara pemerasan dan penindasan. Tuhan menciptakan dunia menurut gambarannya sendiri orang yang menjajah selama 300 tahun lamanya untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan negaranya

⁸² *Ibid*, hlm. 44

dengan berbagai cara apapun secara ekonomis dari masa lampau hingga sekarang adalah:⁸³

- a. Perampokan terang-terangan, dahulu dilakukan oleh bangsa Portugis dan Spanyol.
- b. Monopoli, yang dalam praktiknya sama dengan perampokan masih terus diaktualisasikan Belanda hingga sekarang.
- c. Setengah monopoli, mulai dilakukan oleh Inggris di India.
- d. Persaingan bebas, mulai dilakukan Amerika di Filipina.

Cara imperialis lain hampir dapat disamakan dengan cara di atas, namun cara penindasan dalam politik adalah seperti dibawah ini:⁸⁴

- a. Imperialisme biadab, yakni menghancurkan sekalian kekuasaan politik bumiputra dan menjalankan pemerintahan sewenang-wenang.
- b. Imperialisme autokratis, seperti belanda yang tidak berbeda dengan point a.
- c. Imperialisme setengah liberal, adalah imperialisme yang memberikan setengah kekuasaan terbatas terhadap bumiputra yang berkuasa
- d. Imperialisme liberal, adalah imperialisme yang memberikan kekuasaan dalam kemerdekaan sepenuhnya kepada tuan tanah yang besar serta kepada borjuis bumi putra.

Akibat dari macam cara pemerasan dan penindasan, maka sebagai inti dari perampokan yang dikelola oleh kolonial adalah adanya halauan dari tanah jajahannya. Walaupun ada semangat revolusioner yang berapi-api dengan

⁸³ Tan Malaka, *Aksi Massa*, (Yogyakarta: Narasi, 2019), hlm. 32

⁸⁴ Ibid, hlm 33

perjuangan yang berkobar amunisi itu masih belum cukup hingga imperialisme Belanda masih berdiri. Perihal Indonesia sekarang dan nanti melihat konsep dari perampokan imperialisme, jika yang dimaksud semuanya adalah bagian dari ulah manusia yaitu Belanda. Ia sendiri juga telah mengenal tabiat dan pekerti bangsa Belanda tetapi imperialisme belanda menjadi seorang bangsa belanda yang kita kenal dulu dan sekarang jahat dan bengis.⁸⁵

Saat Belanda menginstruksikan armadanya ke Indonesia untuk membajak diketahui bahwa negeri Belanda itu hanya negeri para petani dan warung kopi kecil-kecil, Sehingga tidak memiliki bahan dasar untuk industri besar apabila negeri Belanda tidak memiliki tanah jajahan, ia tidak akan mampu bersaing dengan negara-negara kolega di Eropa. Dengan keberanian dan kemauan seorang bajak laut serta keserakahan warung kopi kecil-kecil maka habislah negara Indonesia dirampasnya, tak ada sebutir pun batu untuk perumahan ekonomi bumiputra yang tersisa.

Negeri Belanda datang ke Indonesia dan pulang dari negara jajahannya mereka dengan karung yang penuh isi dihamburkannya uang-uang Indonesia dan dari mereka menyedot dana pensiun dari peti uang Indonesia dan akhirnya bocor dan kering – mengering keadaan ekonomi Indonesia. Andai saja Belanda adalah negara maju dengan industri niscaya mereka akan menggunakan cara politik yang lain seperti negara Inggris dan Amerika.

Belanda akan menggunakan cara politik liberal terhadap orang Jawa atau bangsawan Jawa akan tetapi 20 tahun belakangan ini Belanda mulai

⁸⁵ Ibid, hlm 43

mengindustrialisasi terhadap negara Indonesia, tujuannya yang utama adalah monopoli kapitalnya tetap menggunakan kapital luar negeri. Jurang antara penjajah dengan si terjajah sekarang masih akan tetap sama seperti Deandels dan Van Den Bosch hanya suara revolusi yang akan menimbun suara-suara gemuruh dalam jurang yang dalam itu.

Tetapi karena hal inilah suatu saat Indonesia akan memberi selamat kepada negara-negara imperialisme yang dipertahankan oleh Belanda, itu karena dari pertentangan yang tajam di Indonesia dengan munculnya pertentangan sosial suatu massa nanti keadaan akan timbul kodrat baru yang akan melepaskan Indonesia dari hegemoni tindakan kaum Barat yang akan melebur selamalamanya.⁸⁶

B. Aksi Massa Menuju Revolusi Sosial

Kapitalisme lahir di Indonesia merupakan cangkokan dari Eropa yang dalam beberapa hal tidak sama dengan kapitalisme yang tumbuh dan berkembang dalam negerinya sendiri, yakni Eropa dan Amerika Utara. Kapitalisme di Indonesia itu masih sangat muda dalam hal kapasitasnya belum terpusat sebagaimana semestinya, melihat industri di Indonesia terutama dalam industri pertanian masih terbatas di Jawa dan di beberapa tempat di Sumatra tanah yang luas yang subur mengandung bahan-bahan logam dengan nilai yang tinggi seperti Sumatra Borneo Sulawesi yang masih menunggu tangan manusia untuk pengerjaannya.

⁸⁶*Ibid*, hlm. 44

Industri modern yang sebenarnya tidak akan ada di pulau Jawa sehingga industri yang ada hanya industri pertanian. Sedangkan Sumatra yang menjadi ladang industri modern banyak logam-logam seperti besi emas, hal ini sebagian kecilnya sudah terbukti, artinya akan dikenal baik itu kalangan nasional maupun internasional. Imbas dari kapital maka ada pemisahan etnik kota dengan desa, kemajuan kapitalisme mereka akan menguasai seluruh sektor produksi industri dan produksi pertanian. Sehingga semakin maju kapitalisme banyak penduduk yang awalnya tinggal di desa ditarik untuk mengisi posisi perkotaan, karena di kota akan memperoleh banyak pekerjaan, lebih banyak rumah-rumah dan pendidikan yang lebih mendapatkan kesenangan dari pada di desa.

Jika dipakai perbandingan antara penduduk kota dan desa maka Indonesia akan terlihat masih bayi dalam hal industri apabila itu menjadi suatu barometer dalam hal industri. Kapitalisme di Indonesia tidak dilahirkan oleh cara produksi bumiputra yang menurut kemauan alam. Mereka adalah perkakas asing dengan kekerasan mendesak dipergunakan untuk kepentingan-kepentingan asing, sehingga dapat dilihat dengan kemajuan industri disetiap negeri sejajar dengan kota-kota yang mengeluarkan barang industri, seperti emas besi perkakas pertanian obat-obatan dan desa mengeluarkan beras sayur binatang ternak susu. Barang-barang kota yang berlebih digunakan sebagai penduduk kota sebagai keperluan hidupnya dan ditukarkan kepada barang-barang penduduk desa.

Desa mengeluarkan barang seperti gula karet dan teh barang-barang yang membuat kaya saudagar asing, tapi memiskinkan dan memelaratkan kaum tani. Kota bukan menjadi pusat ekonomi bangsa Indonesia melainkan menjadi sumber

ekonomi yang tujuannya adalah mengalirkan keuntungan bagi para setan-setan uang luar negeri. Lalu dengan melihat kejadian ini apakah bangsa Indonesia penyebabnya, jawabannya adalah politik perampok Bangsa Belanda memusnahkan sekalian benih-benih industri bumiputra, hongihongihongicultuurstelsel monopoli dan gencatan pajak yang tidak ada ampunnya VOC yang menghancurkan semua alat-alat sosial ekonomi.⁸⁷

Kemungkinan besar akan timbulnya revolusi di Indonesia:⁸⁸

1. Kekayaan dan kekuasaan sudah tertumpuk didalam genggamannya beberapa orang kapitalis.
2. Rakyat Indonesia semuanya makin lama makin miskin, melarat, tertindas.
3. Pertentangan kelas dan kebangsaan semakin lama semakin tajam.
4. Pemerintah Belanda semakin lama semakin reaksioner.
5. Bangsa Indonesia dari hari ke hari semakin bertambah kerevolusionerannya dan tidak mengenal damai.

Berangkat dari revolusi Tan Malaka menggagas sebenarnya revolusi bukan sebuah ide yang luar biasa dan istimewa serta bukan muncul dari perintah manusia yang luar biasa, Kecakapan yang luar biasa dari seseorang dalam membangun revolusi melaksanakan atau memimpin menuju kemenangan tidak dapat diciptakan dari dirinya sendiri, akibat dari pergaulan hidup sebab dari tindakan masyarakat-masyarakat atau dalam kata dinamis mereka adalah akibat dari persaingan kelas yang tajam dari hari ke hari, sehingga persaingan atau

⁸⁷ Tan Malaka, *Opcit*, hlm. 50

⁸⁸ *Ibid*, hlm. 90

pertentangan itu akan muncul pertempuran yang ditentukan dari berbagai macam faktor ekonomi sosial politik.

Pertentangan masyarakat menyebabkan adanya persaingan, sehingga semakin besar kekayaan pada satu pihak semakin beratlah kesengsaraan dan perbudakan yang terjadi dilain pihak, singkatnya adalah terjun ke dalam jurang yang terbentuk pada masyarakat, antara kelas yang diperintah dengan kelas yang memerintah, maka semakin besarlah hantu revolusi. Tujuan sebuah revolusi adalah menentukan kelas, artinya hal yang akan terjadi yaitu pergulatan dalam kelas karena mereka berebut antara yang memegang kekuasaan negeri, politik, ekonomi dan revolusi yang akan dijalankan dengan cara kekerasan.

Tan Malaka menginginkan persatuan antara SI dan PKI guna memperjuangkan kemerdekaan, terlihat saat sidang komintern ia menyampaikan dengan spirit yang kuat dan menegaskan bahwa Pan Islamisme bukan musuh bagi komunisme melainkan kolega sebagai perlawanan nantinya terhadap hegemoni imperialis dan kapitalis. Pada sidang komintern Tan Malaka mengambil gerakan SI di Jawa, SI menurutnya memiliki basis yang kuat dan massa yang banyak dengan sifat spontanitas dan revolusioner mereka juga melakukan propaganda dengan pemogokan makan bersama kaum buruh dengan jargon mengatakan bahwa kekuasaan hanya ada pada petani miskin dan kekuasaan hanya pada kaum proletar.⁸⁹

Bagi Tan Malaka gerakan seperti itu harus didukung karena gerakan dengan tujuan sama apa yang sudah digaungkan oleh SI dan komunisme yaitu

⁸⁹ Franz Magnis Suseno, *Madilognya Tan Malaka*, dalam *Basis*, No. 03-04, tahun-50, Maret-April, 2001, hlm. 47

dengan tujuan untuk melakukan perlawanan terhadap kaum imperialis dan kaum kapitalis guna menyingkirkan dari bangsa ini, Ia dengan lantang juga menyerukan bersatunya dua kekuatan revolusioner yaitu Islam dan komunisme dengan demikian jelas sikap Tan Malaka mendukung persatuan seluruh kekuatan revolusioner rakyat tidak fanatisme terhadap golongan atau kelompok.

Ada gagasan Tan Malaka tentang strategi dan taktik dalam langkah-langkah perjuangan kemudian menjadi tesis yaitu:

- a. Mogok umum dengan tuntutan ekonomi.
- b. Mogok demonstrasi dengan tuntutan ekonomi politik.
- c. Mogok umum dan demonstrasi bersenjata untuk kemungkinan melawan provokasi.
- d. Mogok umum dan demonstrasi menuntut pemindahan kekuasaan.
- e. Mengadakan majelis permusyawaratan rakyat.
- f. Memproklamkan dan membentuk pemerintahan sementara.
- g. Membentuk undang-undang dasar.
- h. Mengesahkan pemerintah dan menentukan garis besar dalam politik.
- i. Membentuk DPR dalam membentuk undang-undang.

Menurut Tan Malaka dalam melakukan pemberontakan paling tidak disiapkan massa yang sadar dan revolusioner serta mengorganisir kaum proletar untuk menjalankan pemberontakan tersebut. Pemberontakan harus dilakukan dengan teratur dan terencana sesuai buku yang ia gagaskan dalam *aksi massa* dalam gagasan tersebut ia menjelaskan bahwa yang terpenting dilakukan partai adalah melakukan pemahaman ditingkat basis agar persoalan yang dihadapi rakyat

dapat mereka rasakan, sehingga dengan kesadaran ketertindasan massa akan menjadi sadar dan melangsungkan kegiatan dalam pemberontakan.

Tan Malaka melihat sepenuhnya perjuangan yang bersifat revolusioner sesuai garis massa akan memenangkan perjuangan. Sehingga pada saat itu Tan Malaka berpeluang untuk memainkan peran untuk menggulingkan pemerintahan yang pengecut dalam menentukan sikap atas datangnya sekutu dan Belanda. Ia mendapat dukungan dari sipil dan militer dengan mudah untuk menguasai Republik dalam pemberontakan, namun ia tetap mempercayakan kepada pemimpin nasional ia meyakini karena sama-sama putra terbaik bangsa.

Ia tidak menggunakan jalan yang ditempuh oleh Amir Syarifudin dan Musso, hasilnya pemberontakan yang dilakukan dengan mudah ditumpah Tan Malaka menggunakan cara tersendiri dengan cara gerilya dengan datangnya sekutu dan militer, karena tidak percaya perundingan-perundingan dengan para imperialis. Dengan kegagalan pemberontakan Tan Malaka belajar bahwa perlunya menghimpun pengorganisasian massa yang teratur dalam karyanya *aksi massa* Tan Malaka melakukan analisa situasi politik baik yang sifatnya global dan menawarkan strategi dan taktik yang terukur, sehingga dengan karyanya juga membaca gerakan revolusioner bagi kemerdekaan 100% untuk bangsa dan tanah air.

Tan Malaka melihat revolusi Indonesia tidak beda dengan tokoh lainnya yang menginginkan revolusi sosial. Menurut pandangannya revolusi yang dikobarkan bukan hanya revolusi politik saja melainkan revolusi yang global mendunia mulai dari penghapusan feodal, revolusi kemerdekaan yang itu semua

menjadikan bangsa ini adil makmur, berarti esensi itu semua adalah penolakan para pejuang revolusioner terhadap kapitalisme.⁹⁰

Upaya untuk membangun perekonomian di Indonesia menurut Tan Malaka ada gagasan rencana ekonomi untuk penerapannya di Indonesia. Sosialis merupakan sebagai jawaban selama ini untuk menolong rakyat dari tangan kapitalisme yang telah menindas bangsanya selama berabad-abad dan dengan gagasan itu kapitalisme akan lenyap. Kapitalisme hidup hanya dalam pusaran modal kaum kapitalis, sehingga ada kritik terhadap nilai lebih dari Marx kritiknya terhadap kapitalis adalah perampokan yang dilakukan kapitalis terhadap rakyat, sehingga perekonomian dunia menurutnya perekonomian berdasarkan kapitalistik demokrasi dan fasisme tidak akan mensejahterakan masyarakat Indonesia.

Perekonomian liberal klasik sebagaimana yang ditunjukkan Tan Malaka dengan merujuk kepada pendapat Marx setiap individu merdeka untuk memproduksi sesukanya, menurut kaum kapitalis maka hasrat mencari untung adalah hak setiap individu dan itu diperkuat dengan teori ekonomi klasik yang menyatakan bahwa pertama, kegiatan ekonomi dalam kapital digerakkan dalam sistem pasar dan instrument harga sebagai penanda. Namun, sistem kapitalisme menurut Tan Malaka menyebabkan siapa yang kuat secara modal maka itulah yang akan bertahan.

Berangkat dari permasalahan modal pastinya dalam prinsip kepemilikan finansial pasti dalam setiap kehidupan tidak memiliki modal dengan jumlah

⁹⁰ Fitri R. Ghazally, *20 Tokoh Nasional Abad 20*, (Jakarta: Progress, 2004), hlm. 60

kapasitas yang sama sehingga ketidaksamaan itu akan mengakar dan mengekalkan bentuk perbedaan mencolok terhadap kelas sosial diantara kelas borjuis dan proletariat. Modal yang tidak sama nantinya buruh hanya akan mendapatkan upah yang kecil dan membuat kondisi buruh akan tetap seperti itu tidak akan menjadi lebih baik dengan hidup serba kekurangan.

Kelas borjuis serba kelebihan dan kelas proletar serba kekurangan akhirnya kelas yang lemah yang miskin tidak mampu menambah untuk menutupi kekurangan. Puncak produksi persaingan hebat antara kapitalis satu dengan kapitalis lain dalam satu negara, belum lagi persaingan antara negara kapitalis akhirnya banyak dari mereka menanamkan suatu modal di dalam negara-negara lemah, lalu memonopoli hasil bumi untuk kepentingan negara.

Kontestasi dalam dunia kapitalistik akan memunculkan imperial-imperial baru dan akhirnya timbul peperangan, karena orientasi terhadap kekuasaan kekayaan hasil bumi untuk merebutnya dari negara jajahannya dan berakhir produksi pada peperangan imperialisme. Pendapat Marx terhadap krisisnya kapitalisme disebabkan produksi yang over berlebihan, sehingga akan di ekspor ke negara jajahan yang menciptakan pasar baru dalam dunia kapitalis, siklusnya berubah tidak lagi seperti dalam kapitalis klasik minandas majikan terhadap buruh dan pabrik, namun akan berkembang menjadi penindasan negara kapitalis terhadap negara terjajah atau dunia ketiga.⁹¹

Pemikiran Tan Malaka apabila dilihat dengan konsep politik ekonomi yaitu menolak kapitalisme di Indonesia sikap itu sudah ditentangya sejak pra

⁹¹ Karl Marx, *Sosialisme dan Kapitalisme*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000), hlm. 72

kemerdekaan Indonesia, bahwa setelah disahkan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945 maka secara hukum internasional merdeka sepenuhnya secara mutlak. Negara Indonesia berhak mengambil kembali alat-alat produksi yang sudah dirampas bangsa asing dan memberikan alat produksi itu kepada rakyat Indonesia.⁹²

Salah satu bagian term dari kapitalistik mengatakan bahwa mendorong investasi asing menyudutkan ekonomi Indonesia sudah berada dalam ekonomi liberal. Artinya masyarakat bukan lagi sebagai subjek melainkan sebagai obyek ekonomi, dampak dari itu semua merupakan hegemoni barat yang memiliki peran pemodal yang begitu kuat. Sehingga hal itu yang nantinya akan membentuk kelas seperti yang digagaskan oleh Marx dalam teorinya menyatakan rakyat yang tidak memiliki modal maka akan menjadi budak bawahan buruh dari pemilik modal.⁹³ Sejatinya Tan Malaka ingin melepaskan diri dari hegemoni barat yang merasuk negara Indonesia baik secara politik maupun ekonomi.

Tan Malaka menyakini tentang materialisme historis dan dialektika materialisme dalam kerangka berpikirnya dalam gagasannya tentang rancangan ekonomi sosialis, ia mengatakan bahwa manusia diseluruh dunia sedang menuju pada masyarakat komunis. Hal itu terlihat pada masyarakat kapitalis yang bertentangan dengan sistem kerja bersama dari yang tidak mempunyai melawan kepemilikan secara perseorangan yang akan hilang. Masyarakat sosialis merupakan lahirnya masyarakat komunis modern dalam kerja bersama dan alat-

⁹² Safrizal Rambe, *Pemikiran Politik Tan Malaka*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hlm. 94

⁹³ Karl Marx, *Opcit*, hlm. 42

alat kepemilikan produksi dimiliki secara kolektif dengan tujuan kemakmuran bangsa yang merupakan sebuah cita-cita revolusi sosial yang diproklamirkan oleh Tan Malaka.⁹⁴

Pada masa genting revolusi Tan Malaka pernah mengungkapkan sosialisme 100% menurutnya itu bisa dijalankan dengan kekuatan lahir batin bangsa Indonesia. Perspektif keindonesiaan keadaan ekonomi yang telah ada sudah dirampas penjajah, sehingga tidak ada lagi yang tersisa di pribumi. penyebabnya adalah pengusaha dari pribumi tidak bisa melakukan persaingan terhadap Belanda belum lagi adanya imperialisme penjajah.

Pandangan Tan Malaka mengenai harmonisasi ekonomi masih timpang dan belum terkordinasi. Ia menyebutkan perkotaan yang belum mempersentasikan sebagai produsen dari peralatan kebutuhan keluarga dan pertanian, namun yang terjadi adalah perkotaan hanya melakukan barang impor yang mendatangkan barang dari luar negara melalui imperialistis, sehingga dalam pandangan Tan Malaka apabila itu akan terus maka akan menguntungkan para kapitalistik dan merugikan pribumi. Padahal yang diketahui pribumi sendiri pandai dalam mengelola persawahan tetapi mengapa harus impor.

Perbaikan perekonomian Indonesia menurut Tan Malaka belum cukup dengan mendirikan apa yang dinamakannya kelompok pemikir tetapi bantuan dari watak rakyat Indonesia sendiri, buruh dan pedagang harus ikut turun langsung dalam perencanaan produksi, pembagian distribusi, dan pertukaran barang. Baginya tidak penting orang memiliki selusin titel untuk memikirkan

⁹⁴ Fahsin M. Fa'al, *Negara dan Revolusi Sosial: Pokok-Pokok Pikiran Tan Malaka*, (Yogyakarta: Resist Book, 2010), hlm. 110

kepentingan buruh dan tani tanpa mengikutsertakan para buruh dan tani mereka akan giat bekerja, apabila mereka ikut langsung dan merasakan perencanaan ekonomi.⁹⁵

Penyakit ekonomi di Indonesia sudah sangat begitu akut akibat dari penjajahan Belanda yang mereka tinggalkan sejak 350 tahun itu. Sehingga kapitalisme sudah tercangkok belum lagi kapitalisme dan militerisme jepang selama 3,5 tahun bagi Tan Malaka semua itu tidak bisa lagi di obati hanya dengan pil saja melainkan harus dilakukan pembedahan melalui operasi. Perekonomian Indonesia baru dapat diselenggarakan dengan republik yang merdeka 100% sangat minimal sekali rakyat Indonesia harus menguasai 60% produksi, distribusi, upah, impor dan ekspor.

Strategi ekonomi Tan Malaka menginginkan kaum murba cepat tanggap dalam proses ekonomi yang dihadapi tidak hanya berpangku tangan saja. Kaum murba yang terdiri dari buruh petani pemikir intelektual harus menunda rencana ekonomi sejati, melainkan mereka harus mengadakan revolusi sosial dengan kemenangan kaum murba. Revolusi kaum murba tetap dianjurkan tentang rencana ekonomi yaitu rencana ekonomi perang melawan Belanda. Tan Malaka merumuskan dua hal. *Pertama* mengambil sikap dan tindakan terhadap ekonomi produksi distribusi tujuan untuk merugikan ekonomi belanda. *Kedua* dalam melakukan revolusi peran ekonomi untuk mengambil sikap tindakan yang sifatnya menguntungkan rakyat.⁹⁶

⁹⁵ *Ibid*, hlm. 116

⁹⁶ Tan Malaka, *Gerpolek: Gerilya Politik Ekonomi*, (Yogyakarta: Narasi, 2019), hlm. 113

Tan Malaka mengharuskan adanya sistem koperasi untuk mengisi kekurangan dalam siasat perang ekonomi menghadapi perekonomian musuh. Itu merupakan rencana perekonomian paling tidak untuk mengidealkan kemandirian ekonomi bangsa Indonesia melihat kultur dan cara kerja ekonomi bangsa kita sendiri. Sekaligus diperlukan juga strategi perlawanan terhadap hegemoni kapitalis Belanda melalui strategi yang dijalankan melalui tradisi dan kekayaan bumiputra rakyat harus ikut serta dalam proses produksi sehingga mereka merasa memiliki dan dilibatkan.

Pada akhirnya dengan melibatkan para buruh petani pedagang akan bahu-membahu dalam membentengi kegiatan perekonomian nasional bangsa Indonesia dari campur tangan kapitalistik. Perjuang dalam ekonomi tersebut dapat kita raih apabila kita merdeka 100% selama kemandirian politik belum terbentuk mustahil akan terciptanya tatanan politik yang mandiri, maka akan terciptanya perekonomian yang seimbang antara Indonesia dengan perekonomian internasional.

Tan Malaka akhirnya mengungkapkan bahwa revolusi hadir akibat munculnya pertentangan kelas sosial di masyarakat yang tidak harmonis, tajamnya perentangan kelas dilatarbelakangi oleh beberapa faktor diantaranya faktor ekonomi, politik, psikologi, apabila semakin besar ekonomi disatu pihak maka akan sempit kekuatan ekonomi dipihak lain. Maka bayangkan revolusi semakin besar tujuan revolusi sebenarnya menentukan yang dapat memegang kekuasaan baik itu politik maupun ekonomi.

Tan Malaka menghendaki lahirnya revolusi total yakni revolusi yang cara berpikir rasional lewat aksi-aksi revolusioner, karena revolusi bertolak dari kebutuhan perjuangan kelas dari kesadaran manusia yang telah menemukan ilmu pengetahuan dan meninggalkan kesadaran lama melalui dogma-dogma kuno dalam pergaulan melihat realitas objektif, maka ada pembongkaran sistem kelas yang terjadi di dalam masyarakat itu. Perjuangan tentang keadilan politik dan ekonomi manusia sejak itu tidak lagi membutuhkan tuhan atau penganut mistik, tetapi bertindak terhadap kejadian faktual nyata dan berusaha sehingga berjuang untuk memperbaiki tatanan itu sendiri.⁹⁷

Dalam tinjauan tentang lahirnya revolusi menurut Tan Malaka menentukan adanya syarat-syarat ideal yang terjadi revolusi di Barat. Tan malaka menekankan satu proses revolusi bukan saja menghukum suatu kecurangan dan kelaliman, melainkan menuju kesentosaan dalam kekuatan moral revolusi yang akan terwujud terjadinya kecerdasan pikiran dengan kekuatan untuk mendirikan peradaban baru.

Bagi Tan Malaka revolusi sejatinya adalah menciptakan jalan terbaik untuk menghancurkan sistem feodalisme dan kolonialisme.⁹⁸ Aksi revolusioner merupakan aksi turun jalan memboikot aset-aset penguasa dan melakukan mogok kerja dengan melibatkan massa yang berjumlah besar, menurutnya juga revolusi harus dikontekstualisasikan terhadap keindonesiaan garis tegas tersebut

⁹⁷ Albert Doni Koesoemo, *Menuju Indonesia Merdeka dan Sosialis*, Dalam Basis No. 01-02 Tahun Ke 50 Januari-Februari, 2001, hlm. 60

⁹⁸ Tan Malaka, *Aksi Massa*, (Yogyakarta: Narasi, 2019), hlm. 8

menjadikan Tan Malaka memiliki karakter tersendiri saat menjalankan revolusinya.⁹⁹

Untuk merumuskan revolusi harus dipertimbangkan strategi dan taktik karena itu yang menentukan keberhasilan dalam revolusi, jika meleset perhitungan maka akan mendapatkan kegagalan dalam revolusinya. Dalam bukunya *Naar de Republik* ia menjelaskan taktik merupakan bagian dari strategi, taktik merupakan berkaitan dengan operasi waktu tempat sedangkan strategi adalah jumlah keseluruhan yang berkaitan dengan operasi revolusioner baik kurun waktu periode berlangsungnya revolusi.

Dalam suatu praktek pukulan taktis adalah bagaimana kita menggunakan seluruh kekuatan untuk suatu tujuan terbatas.¹⁰⁰ Ia menyebutkan dalam pemogokan VTSP pada tahun 1923 dan pemogokan di Priangan merupakan bagian dari pukulan taktis. Sementara pukulan strategis merupakan pukulan terakhir ketika sudah dikerahkan kekuatan strategis untuk mendapatkan kemenangan dengan cara mematahkan hubungan organisatoris musuh dengan menguasainya artinya dengan pukulan taktis dapat menunjukkan keberanian dan dengan pukulan strategis akan dapat menunjukkan harapan-harapan lebih baik.

Pada pengantar buku *Menuju Republik Indonesia* Tan Malaka menyebutkan sekarang partai komunis Indonesia dapat menyebutkan gerakan revolusioner adalah saya kesadaran inilah yang memunculkannya program dan taktik dari segerombolan rakyat yang tergabung dalam PKI dan Sarekat Rakyat,

⁹⁹ Fahsin M. Fa'al, *Opcit*, hlm. 119

¹⁰⁰ *Ibid*, hlm. 120

kemauan penjelmaan revolusioner di dalam perjuangannya Tan Malaka melihat negara Soviet akan berhenti hanya sebagai negara, jika seorang borjuis hanya sebagai penindas dan pemeras telah dibasmi akan berubah menjadi pekerja masyarakat komunis.¹⁰¹ Maka bagi Tan Malaka gerakan revolusioner mutlak akan diperlukan organisasi yang teratur dan massa yang sadar.

Tan Malaka melihat revolusi nasional merupakan revolusi dengan gagasan melakukan perlawanan terhadap hegemoni kapitalisme dan imperialisme dalam hal itu dapat dikatakan bahwa revolusi nasional Indonesia adalah sebuah reaksi dari imperialisme sebagai level tertinggi di era kapitalisme dalam pandangan historis materialisme dengan memakai analisa dialektika Marx menyatakan bahwa perubahan masyarakat yang sebenarnya terjadi melalui perubahan sistem produksi itu sendiri yang diperjuangkan oleh negara-negara.¹⁰²

C. Pengelolaan Sumber Daya Alam Ditinjau Dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945

Pasal 33 UUD 1945 hasil amandemen yang terdiri dari lima ayat merupakan norma dasar yang menjadi arah kebijakan ekonomi dan landasan kebijakan ekonomi nasional. Pasal 33 UUD 1945 selanjutnya dijabarkan ke dalam undang-undang dan peraturan perundang-undangan sebagai kebijakan hukum dalam hal perekonomian yang lebih operasional. Pasal 33 UUD 1945 juga sebagai norma hukum konstitusional yang bersifat mutlak yang tidak boleh dilanggar oleh

¹⁰¹ *Ibid*, hlm. 121

¹⁰² Safrizal Rambe, *Opcit*, hlm. Hlm. 132

penentu kebijakan ekonomi yang sifatnya operasional. Kebijakan ekonomi harus mengacu tidak boleh bertentangan dengan dengan pasal 33 UUD 1945.¹⁰³

Dengan menjadikan konstitusi sebagai hukum tertinggi, harus menjadikan pasal 33 UUD 1945 yang mengatur perekonomian nasional sebagai norma tertinggi yang outputnya harus membumikan prinsip-prinsip dasar ekonomi. Spirit konstitusi khususnya yang menyangkut pasal 33 UUD 1945 tersebut akan dielaborasi dengan pendekatan politik hukum dalam konteks sejarah saat pembentukan pasal 33 UUD 1945. Politik hukum merupakan arah kebijakan hukum yang diterapkan saat penyusunan suatu produk hukum. Menurut Mahfud MD, politik hukum diartikan sebagai kebijaksanaan hukum (*legal Policy*) yang telah dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah.¹⁰⁴ Dalam hal ini politik hukum merupakan legal policy diterapkan terhadap pilihan hukum dalam rangka suatu pencapaian tujuan tertentu.

Pendekatan sejarah tidak bisa dilepaskan dari sejarah pembentukan pancasila dan UUD 1945. Pada 1 Maret 1945 pemerintah Jepang mengumumkan BPUPKI yang diketuai oleh Radjiman Wideo Diningrat yang diangkat pada tanggal 29 April 1945.¹⁰⁵ Badan ini dengan anggota 62 yang tugasnya untuk menyusun rancangan undang-undang dasar (UUD). Akan tetapi yang berkembang

¹⁰³ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Ekonomi*, (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2010), hlm. 69

¹⁰⁴ Taufiqurrahman Syahuri, *Jurnal Konstitusi*, Volume 9, Nomor 2, Juni 2012, hlm. 251

¹⁰⁵ Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Noto Susanto, *Sejarah Nasional Indonesia VI*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1993), hlm. 67

dalam sidang-sidang pertamanya adalah soal dasar falsafah yang dipersiapkan dalam rangka kemerdekaan Indonesia.¹⁰⁶

Pada sidang pertama karena hanya menghasilkan perdebatan sehingga waktu yang disediakan sudah habis akhirnya BPUPKI hanya menghasilkan pembentukan panitia sembilan yang ditugaskan untuk mencari kesepakatan tentang dasar negara. masa sidang pertama (29 Mei-1 Juni 1945) Panitia sembilan menghasilkan kesepakatan yang terangkum dalam piagam Jakarta yang diterima dalam sidang II BPUPKI tanggal 11 Juli 1945 kemudian menjadi cikal bakal Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia.¹⁰⁷

Pada tanggal 11 Juli 1945 BPUPKI berhasil merumuskan pasal 33 dalam rancangan UUD 1945 pada waktu itu diatur dalam pasal 32 Bab XIII “*Kesejahteraan Sosial*”, yang berbunyi:

1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh pemerintah.
3. Bumi dan air kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan harus diperjuangkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Politik hukum pasal 33 UUD 1945 dapat dielaborasi dari pemikiran penggagas konstitusi. Dalam penyusunan Pasal 33 ayat 1, 2, dan 3 penggagas menghendaki adanya pemikiran bahwa pemimpin-pemimpin Indonesia yang menyusun UUD 1945 mempunyai kepercayaan terhadap cita-cita keadilan sosial

¹⁰⁶ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), hlm. 39

¹⁰⁷ Moh. Mahfud M.D, *Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta: LP3ES, 2006), hlm. 29-30

dalam bidang ekonomi dapat mencapai kemakmuran yang merata. Konsep tersebut merupakan pada pembahasan terkait hal-hal apa saja yang dikuasai negara dan hal penguasaan negara demi kemakmuran rakyat itu sendiri.

Implikasi dari hak penguasaan negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat memberikan kewajiban negara untuk: (1) segala bentuk pemanfaatan (bumi dan air) serta hasil yang didapat (kekayaan alam), harus secara nyata meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat; (2) melindungi dan menjamin segala hak-hak rakyat yang terdapat di dalam atau di atas bumi, air, dan pelbagai kekayaan alam tertentu yang dapat dihasilkan secara langsung atau dinikmati langsung oleh rakyat; (3) mencegah segala tindakan dari pihak manapun yang menyebabkan rakyat tidak mempunyai kesempatan atau kehilangan haknya dalam menikmati kekayaan alam.¹⁰⁸ Komulasi dari tiga ayat tersebut merupakan nilai keadilan oleh negara bagi rakyatnya dalam hal keadilan sosial.

Pasal 33 undang-Undang Dasar 1945 secara tegas menolak individualisme dan liberalisme. Individualisme adalah individu-individu dengan paham individual dan di tempatkan kepada kedudukan utama, membentuk masyarakat (society) melalui suatu kontrak sosial. Individualisme adalah representasi dari liberalisme. Itulah sebabnya sesuai faham kolektivisme atau komunitarianisme, maka kepentingan masyarakat di tempatkan sebagai utama, sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.

Hal inilah menjadi ciri sosialistik Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, boleh dikatakan inilah ke-Indonesiaan, suatu representasi sosial ekonomi yang

¹⁰⁸ Yudi Latif, *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm. 602

harus ditegakkan. Sistem ekonomi Indonesia disebut oleh Mohammad Hatta sebagai sosialisme religius. Berikut penjelasan Pasal 33 Undang-Undang dasar 1945 :

Dalam pasal 33 tercantum dasar demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua dibawah pimpinan atau penilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakat yang diutamakan bukan kemakmuran orang-seorang. Sebab itu perekonomian dibangun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu adalah koperasi.

Perekonomian berdasarkan atas demokrasi ekonomi, kemakmuran bagi setiap orang sebab itu bagi cabang-cabang produksi penting bagi dan negara yang menguasai hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara. Jika tidak, tampuk produksi jatuh ke tangan orang-orang yang berkuasa dan rakyat yang banyak di tindasnya.

Hanya perusahaan yang tidak menguasai hidup orang banyak boleh ada di tangan orang-seorang.

Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung dalam bumi adalah pokok-pokok kemakmuran rakyat. Sebab itu harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Penjelasan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 mengandung makna bahwa perekonomian sebesar-besarnya kemakmuran bersama (bukan kemakmuran orang-seorang), menunjukkan bahwa pasal tersebut mengandung “asas ekonomi kerakyatan”. Sistem ekonomi kerakyatan, maksudnya kedaulatan di bidang ekonomi ada di tangan rakyat, karena itu ekonomi kerakyatan itu terkait dengan gagasan demokrasi ekonomi yang tidak lain adalah paham kebersamaan (mutualism) dan asas kekeluargaan (brotherhood).¹⁰⁹ Berdasarkan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa rakyatlah yang berdaulat (daulat rakyat)

¹⁰⁹ Soeharsono Sagir, *Konstitusi Ekonomi*, (Jakarta: Penerbit Kompas, 2010), hlm. 354

bukan ditentukan oleh pasar, apabila dibiarkan bebas, maka pasar menggusur kedaulatan rakyat (daulat pasar).¹¹⁰

Dalam penjelasan Pasal 33 UUD 1945 tersebut mengandung makna “*asas ekonomi kerakyatan*”, meskipun ungkapan ekonomi kerakyatan memang tidak ditemukan secara eksplisit. Ungkapan konseptual yang ditemukan dalam penjelasan pasal 33 tersebut mengenai “*demokrasi ekonomi*”. Walaupun demikian mengacu pada definisi kata “*kerakyatan*” sebagaimana dikemukakan oleh Mohammad Hatta, serta penggunaan kata kerakyatan pada sila keempat pancasila, tidak terlalu sulit untuk disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan ekonomi kerakyatan sesungguhnya tidak lain dari demokrasi ekonomi sebagaimana dalam Penjelasan Pasal 33 UUD 1945. Artinya bahwa ekonomi kerakyatan hanya ungkapan lain dari demokrasi ekonomi.

Dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 ayat (4), yang berbunyi:

“perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi, kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”

Pernyataan dalam ayat (4) Pasal 33 tersebut mengandung demokrasi ekonomi. Demokrasi ekonomi Indonesia tidak harus sepenuhnya diartikan sebagai prinsip “*equal treatment*” secara mutlak. Demokrasi ekonomi Indonesia bercita-cita mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (*social justice, fairness, equity, equality*), sehingga menyanggah pemihakan (*parsialisme, special favour*) terhadap yang lemah, yang miskin dan yang terbelakang untuk

¹¹⁰ Sri Edi Swasono, *Pasar Bebas yang Imajiner: Distorsi Politik dan Pertentangan Kepentingan Internasional*, (Jakarta: Kantor Menko Ekuin, 1997), hlm. 3

mendapatkan perhatian dan perlakuan khusus ke daerah pemberdayaan. Parsialisme terhadap yang tertinggal ini bukanlah sara melainkan makna positif pada doktrin kebersamaan dalam asas kekeluargaan Indonesia. Inilah titik tolak untuk menegaskan bahwa efisiensi ekonomi berdimensi kepentingan sosial.¹¹¹

¹¹¹ Elli Ruslina, *Jurnal Konstitusi*, Volume 9, Nomor 1, Maret 2012, hlm. 72